

PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS
AKRUAL, SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DINAS DAERAH, DAN GOOD PUBLIC
GOVERNANCE TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH

(Studi pada SKPD dan OPD Kabupaten Sleman)

Dorotea Yovita Putri Herinda¹⁾, Firma Sulistiyowati²⁾

^{1,2}Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

Email : ¹doroteaherinda@gmail.com, ²firma@usd.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this research is to examine the role of government accounting standards based on accrual approach, accounting information system of the regional agency, and good public governance implementation on the quality of local government financial report Sleman District. This method used in this research was the quantitative method with a survey approach. The sample collection in this research uses total of sampling technique. The instrument used in this research is a question with four points Likert scale. The data analysis technique used in this research is validity test using Pearson Product Moment correlation, reliability test using Cronbach's Alpha, assumption classic test using normality, multicollinearity, and heteroscedasticity test. The hypothesis was tested using multiple regression analysis. The result of multiple regression analysis shows that government accounting standards based on accrual approach, accounting information system of the regional agency, and good public governance implementation were positive significantly affected by the quality of local government financial report of Sleman District.

Key words: *Government Accounting Standards Accrual Basis, Accounting Information System of the Regional Agency, Good Public Governance Implementation, The Quality of Local Government Financial Report*

PENDAHULUAN

Era reformasi saat ini, akuntansi sektor publik di Indonesia terus mengalami perkembangan dalam melaksanakan kebijakan pemerintahan, otonomi daerah, dan desentralisasi fiskal pada pemerintah daerah. Untuk mewujudkan otonomi daerah, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang kemudian diperbaharui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual. Peraturan Pemerintah ini mulai diberlakukan pada pemerintah daerah untuk tahun anggaran 2015 (Rahmah dan Zulkifli, 2018).

Tuntutan masyarakat atas akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan lembaga publik terus menguat seiring berkembangnya akuntansi sektor publik dalam otonomi daerah. Pemerintah daerah adalah entitas organisasi sektor publik yang bertanggung jawab untuk menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan kegiatan organisasinya. Sebagai entitas pelapor, pemerintah daerah wajib membuat laporan keuangan yang mengandung informasi yang berkualitas, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat dan masyarakat atas kegiatan organisasinya.

Pemerintah terus berupaya menciptakan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan yang dihasilkan dengan menyusun laporan keuangan tersebut sesuai standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, yaitu Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Standar Akuntansi Pemerintah merupakan suatu pedoman yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan supaya semakin berkualitas. SAP merupakan persyaratan

yang mempunyai kekuatan hukum untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia (Nugraheni dan Subaweh, 2008).

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010, informasi dalam laporan keuangan pemerintah harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang meliputi: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Apabila laporan keuangan yang disusun telah sesuai dengan karakteristik kualitatif tersebut, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Untuk dapat menghasilkan informasi yang berkualitas, pemerintah daerah memerlukan suatu sistem informasi yang dapat membantu untuk menyusun laporan keuangan. Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (SIKAD) merupakan sistem informasi yang digunakan untuk menghasilkan informasi keuangan.

Hall (2007) mengatakan bahwa sistem informasi adalah suatu rangkaian prosedur formal, dimana data yang telah dikumpulkan akan diproses menjadi suatu informasi kemudian didistribusikan bagi para penggunanya. Sistem informasi yang baik dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi atas laporan keuangan yang disajikan. Selain pemahaman terhadap SAP, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah merupakan hal yang penting untuk mendukung terciptanya laporan keuangan yang berkualitas (Sari, Pradana, dan Sujana, 2014). SIKAD yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dikenal dengan Sistem Informasi Akuntansi Dinas Daerah (SIADINDA).

Laporan keuangan yang disusun dengan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (SIKAD) berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), akan diberikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). BPK akan menilai laporan keuangan tersebut dengan mengeluarkan opini audit. Opini audit menjadi bukti apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku.

Kabupaten Sleman telah menerapkan SAP Berbasis Akruwal dan menggunakan SIADINDA dalam pembuatan laporan keuangan serta memperoleh opini WTP delapan kali berturut-turut dari BPK. Opini WTP diberikan oleh BPK karena berdasarkan bukti audit, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berterima umum (dprd.slemankab.go.id). Namun demikian, masih terdapat catatan BPK atas laporan keuangan yang harus diperbaiki (Yusnadewi, Kepala Perwakilan BPK Propinsi DIY) dalam (dprd.slemankab.go.id). Mendapatkan opini WTP bukan berarti memastikan bahwa kinerja pemerintah atau lembaga tersebut dalam menerapkan *Good Public Governance* (GPG) dan pelayanan kepada masyarakat sudah baik (Brodjonegoro, 2014) dalam (Sari dan Tamrin). Pemerintah diharapkan melakukan perbaikan atas pengelolaan tata kelola yang baik dan pelayanan terhadap masyarakat, tidak hanya mengejar raihannya opini WTP.

Organisasi sektor publik dituntut supaya memiliki *good public governance* yang baik terhadap pengelolaan keuangan daerahnya. Adanya tuntutan terhadap peningkatan transparansi dan konsistensi informasi dapat dilihat melalui laporan keuangan (Spathis, Doumpos, dan Zopounidis, 2002). Dengan menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, organisasi sektor publik diharapkan mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, terbebas dari salah saji material.

Tata kelola pemerintahan yang baik menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) 2008 adalah bentuk perwujudan dari suatu negara yang dapat bersaing sehat serta mampu menciptakan nilai tambah berkelanjutan melalui tanggung jawab pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab sehingga kredibilitas negara dibangun. Diterapkannya tatakelola pemerintahan yang baik, mendorong masyarakat menuntut supaya informasi yang disajikan didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kesetaraan dan keadilan. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan sistem akuntansi pemerintah daerah dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (Juwita, 2013). Oleh karena

itu, penerapan SAP, SIADINDA, dan GPG dapat mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan.

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Rahmah dan Zulkifli (2018) tentang Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul, dimana Penerapan SAP Berbasis Akrual dan SAKD tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Pada penelitian sebelumnya hanya menggunakan satu atau dua variabel bebas dengan satu variabel terikat. Dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk mengembangkan variabel bebas yang dianggap memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman ?
2. Bagaimana pengaruh penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dinas Daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman ?
3. Bagaimana pengaruh penerapan *Good Public Governance* terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman ?

Batasan penelitian dalam penelitian ini yaitu penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang tertuang dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dinas Daerah (SIADINDA) yang tertuang dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penerapan *Good Public Governance* (GPG) yang tertuang dalam pedoman Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) 2008 dan pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan merupakan suatu hubungan antara dua pihak, pihak pertama disebut sebagai *agent* dan pihak kedua disebut sebagai *principal*, saling berikatan. Pada teori ini, pihak pertama (*agent*) diberi wewenang oleh pihak kedua (*principal*) untuk melakukan suatu tindakan yang menghasilkan sebuah keputusan (Artana, 2016). Hubungan *principal* dan *agent* dalam pemerintahan dapat digambarkan sebagai hubungan keagenan (*agency relationship*). Teori keagenan merupakan konsep yang mendasari pelaporan keuangan organisasi sektor publik. Pemerintah merupakan *agent* yang berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas organisasinya kepada rakyat selaku *principal*. Informasi yang diberikan pemerintah tersebut digunakan oleh rakyat untuk menilai akuntabilitas dan membuat suatu keputusan.

Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Pada organisasi sektor publik, teori sinyal menjelaskan bahwa pemerintah adalah pihak yang diberi wewenang oleh rakyat ingin menunjukkan sinyal pada rakyat. Sinyal yang diberikan disampaikan melalui laporan keuangan yang disajikan berkualitas. Melalui sinyal tersebut, pemerintah ingin menunjukkan transparansi dan akuntabilitas kinerjanya. Pemerintah daerah juga dapat mengemas informasi prestasi dan kinerja keuangan dengan lebih lengkap untuk menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan amanat yang diberikan oleh rakyat (Artana, 2016).

1. Standar Akuntansi Pemerintah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah (Mahsun, Sulistiyowati, dan Purwanugraha, 2013). Pada PP Nomor 71 tahun 2010, SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), yang dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan serta disusun berdasarkan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

SAP merupakan landasan hukum atau acuan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam mengelola dana secara transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan dapat terwujud. Penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 telah membuat perubahan signifikan terhadap pola pengelolaan keuangan pemerintah Indonesia. Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010, SAP menggunakan basis akrual untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, serta pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas. Menggunakan akuntansi berbasis akrual berarti seluruh transaksi ekonomi serta peristiwa lain yang terjadi diakui dan dicatat pada catatan akuntansi serta dilaporkan pada periode laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut.

Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan pada pemerintah pusat maupun daerah. Dengan demikian informasi keuangan pemerintahan dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan serta dapat mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas (Nordawan, 2008). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara maupun daerah dapat terwujud melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah, yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang diterima secara umum (Bastian, 2010). Menurut Afiah (2009) standar akuntansi pemerintahan dan kebijakan akuntansi pemerintah daerah terutama mengatur mengenai 3 hal, yaitu: pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 2021, terdapat kerangka konseptual dan 17 (tujuh belas) PSAP yaitu: Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Kerangka konseptual berfungsi sebagai acuan untuk menyelesaikan masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

- a. PSAP No. 01 Penyajian Laporan Keuangan. Basis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, sedangkan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.
- b. PSAP No. 02 Laporan Realisasi Anggaran. LRA berbasis kas tetap disusun meskipun entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan berbasis akrual.
- c. PSAP No. 03 Laporan Arus Kas. Informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran disajikan dalam Laporan Arus Kas.
- d. PSAP No. 04 Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi yang disajikan dalam CaLK harus dapat membantu pembaca untuk memahami kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan secara keseluruhan.
- e. PSAP No. 05 Akuntansi Persediaan. Persediaan diakui saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah.
- f. PSAP No. 06 Akuntansi Investasi. Investasi pemerintah diklasifikasikan menjadi investasi jangka pendek yang merupakan kelompok aset lancar dan investasi jangka panjang yang merupakan kelompok aset nonlancar.

- g. PSAP No. 07 Akuntansi Aset Tetap. Aset tetap diklasifikasikan menurut kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas.
- h. PSAP No. 08 Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
- i. PSAP No. 09 Akuntansi Kewajiban. Kewajiban diakui saat dana pinjaman diterima atau saat kewajiban timbul. Kewajiban dicatat sebesar nominal.
- j. PSAP No. 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Peristiwa Luar Biasa. Koreksi harus segera setelah diketahui ada kesalahan. Setiap perubahan kebijakan akuntansi serta pengaruhnya wajib diungkap dalam CaLK.
- k. PSAP No. 11 Laporan Keuangan Konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- l. PSAP No. 12 Laporan Operasional. Laporan Operasional menyajikan informasi seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan
- m. PSAP No. 13 Laporan Keuangan Badan Layanan Umum. Laporan Keuangan BLU merupakan bentuk pertanggungjawaban BLU yang disajikan dalam bentuk LRA, Laporan Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan CaLK.
- n. PSAP No. 14 Akuntansi Aset Tak Berwujud
- o. PSAP No. 15 Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan
- p. PSAP No. 16 Perjanjian Konsesi Jasa - Pemberi Konsesi
- q. PSAP No. 17 Properti Investasi

2. Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah

Untuk dapat memberikan informasi yang memadai, maka setiap entitas harus mampu membuat laporan keuangan yang berkualitas berdasarkan standar akuntansi yang diterima umum. Hal mendasar dan penting dalam menerapkan akuntansi untuk menyusun laporan keuangan daerah salah satunya adalah sistem akuntansi (Roviyantie, 2011). Akuntansi keuangan daerah merupakan suatu proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat, serta melaporkan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah yang dijadikan informasi untuk mengambil keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak eksternal pemerintah daerah (Halim, 2008: 42).

Menurut Nordiawan (2008), tujuan dari sistem akuntansi keuangan daerah adalah: (1) pertanggungjawaban, (2) manajerial, (3) pengawasan. Ruang lingkup sistem akuntansi keuangan daerah terdiri dari kebijakan sistem akuntansi, prosedur sistem akuntansi, sumber daya manusia, dan teknologi informasi (Ratifah dan Ridwan, 2012) dalam (Defitri, 2018). Sistem Akuntansi Keuangan Daerah menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sekurang-kurangnya memiliki empat prosedur yaitu: prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi aset tetap, dan prosedur akuntansi selain kas.

Karakteristik sistem akuntansi keuangan daerah adalah 1) Basis Akuntansi dan 2) Sistem Pembukuan. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang digunakan Kabupaten Sleman adalah Sistem Informasi Akuntansi Dinas Daerah (SIADINDA). SIADINDA merupakan sistem informasi yang dirancang untuk membantu pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya. SIADINDA dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah yang dikhususkan pada identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta interpretasi atas hasil laporan keuangan tersebut (www.msmgroup.co.id). Keunggulan dari SIADINDA yaitu efektif, efisien, adaptif, aman, informatif, integratif, dan interoperabilitas.

3. Good Public Governance

Berkembangnya globalisasi menyebabkan pergeseran peran pemerintah yang menuntut terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi, dan

Nepotisme (KKN). Organisasi sektor publik dituntut untuk memiliki tata kelola organisasi yang baik, supayasumber daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan dengan bijak. Masyarakat terus menuntut akuntabilitas dan transparansi atas laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah.

Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, diperlukan suatu tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Public Governance*). *Good Public Governance* merupakan sistem atau aturan perilaku terkait dengan pengelolaan kewenangan oleh para penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab dan akuntabel (Effendi, 2009) dalam KNKG (2008). KNKG (2008) mengatakan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik adalah perwujudan dari suatu negara yang dapat bersaing sehat dan mampu menciptakan nilai tambah berkelanjutan melalui tanggung jawab pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab sehingga kredibilitas negara dibangun.

Dengan mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah dapat meningkatkan kinerja setiap instansi pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik dapat membantu setiap instansi dalam proses pengambilan keputusan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menyelenggarakan GPG, menurut KNKG (2008) terdapat lima asas yang mengaturnya yaitu: 1) Demokrasi, 2) Transparansi, 3) Akuntabilitas, 4) Budaya Hukum, 5) Kewajaran dan Kesetaraan.

4. Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan catatan atas informasi keuangan suatu entitas pada periode akuntansi tertentu yang dapat menggambarkan kinerja entitas tersebut. Laporan keuangan disusun untuk menyajikan informasi yang relevan berkaitan dengan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan suatu entitas pelaporan pada periode pelaporan tertentu. Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, komponen laporan keuangan pemerintah daerah yaitu: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan disusun untuk menyajikan informasi tentang posisi keuangan, realisasi anggaran arus kas serta kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna untuk dijadikan bahan dalam pengambilan keputusan serta sebagai alat ukur akuntabilitas entitas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu :

- a. Pemerintah daerah internal
- b. Pemerintah daerah eksternal, yang terdiri dari :
 - 1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
 - 2) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
 - 3) Investor, kreditur, donator
 - 4) Analis ekonomi dan pemerhati pemerintah daerah
 - 5) Pemerintah provinsi
 - 6) Pemerintah pusat
- c. Masyarakat
- d. Sistem Akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (SA-PPKD)
- e. Sistem Akuntansi Konsolidator (SA Konsolidator) (Angelicca, 2019).

Prinsip laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah: 1) Basis Akuntansi, 2) Nilai Historis, 3) Realisasi, 4) Substansi Mengungguli Bentuk, 5) Perioditas, 6) Konsistensi, 7) Pengungkapan Lengkap, dan 8) Penyajian Wajar. Untuk dapat mewujudkan tuntutan akuntabilitas dan transparansi, maka laporan keuangan yang disusun harus memenuhi kriteria karakteristik kualitatifnya. Menurut Peraturan Pemerintah

Nomor 71 Tahun 2010, karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat mencapai tujuannya.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 adalah relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami. Kualitas laporan keuangan suatu entitas sangat tergantung pada seberapa besar informasi yang disajikan tersebut dapat memberikan manfaat bagi para penggunanya serta bagaimana laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan kerangka konseptual, prinsip dasar, dan tujuan akuntansi. Laporan keuangan adalah salah satu alat ukur yang dapat digunakan oleh pengguna laporan keuangan untuk mengukur atau menentukan kualitas entitas organisasi (Maryana, Sukarmanto, Nurhayati, 2018). Semakin baik kualitas laporan keuangannya maka para pelaksana kegiatan organisasi mampu meminimalisir risiko penyimpangan yang dapat dilakukan pihak tertentu.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah

SKPD merupakan perangkat daerah pada pemerintah daerah yang menggunakan anggaran atau barang (Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah). Struktur organisasi SKPD terdiri dari: kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang (PPA/PB), sekretaris SKPD yang terdiri dari beberapakepala subbagian, kepala bidang, dan kepala seksi (Ronanda, 2019). Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016, Kabupaten Sleman memiliki 48 OPD yang terdiri dari: 2 sekretariat, 1 Inspektorat, 19 Dinas Daerah, 2 Rumah Sakit Umum Daerah, 5 Badan Daerah, dan 17 Kecamatan.

Hasil Penelitian Terdahulu

Rahmah dan Zulkifli (2018), meneliti mengenai Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 36 ASN yang bekerja pada bagian akuntansi diempat OPD tertunjuk. Berdasarkan hasil pengujian statistik dengan regresi linier berganda didapatkan kesimpulan bahwa SAP dan SAKD tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemda Gunung Kidul.

Maramis, Morasa, dan Wokas (2018) melakukan penelitian atas Pengaruh Penerapan *Good Governance* (GG) dan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Manado. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini ada 40 orang pegawai bagian keuangan dari 10 OPD Kota Manado. Berdasarkan hasil pengujian statistik dengan regresi linier berganda diperoleh hasil bahwa GG berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemda Kota Manado, sementara SAK tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemda Kota Manado.

Pada jurnal yang berjudul "Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan dan *Good Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" (Herawati dan Nopianti, 2017), dengan menggunakan 50 responden diperoleh hasil bahwa SAP berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemda dan *Good Governance* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemda.

Angelicca, Maya (2019), melakukan penelitian tentang Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah dengan Studi di Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah. Subjek dalam penelitian Angelicca terdiri dari subbagian keuangan dan bendahara keuangan setiap SKPD. Penelitian yang dilakukan terhadap 72 responden, diperoleh hasil bahwa penerapan SAP berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau.

Pujanira (2017), melakukan penelitian tentang Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Penerapan Sistem Akuntansi

Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY. Dengan menggunakan regresi linier sederhana dan berganda untuk menganalisis data terhadap 120 responden, diperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh positif Kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan, pengaruh positif antara Penerapan SAP terhadap kualitas laporan, dan pengaruh positif antara penerapan Sistem Akuntansi Daerah terhadap kualitas laporan.

Perumusan Hipotesis

1. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, semua pemerintah daerah di Indonesia wajib menyelenggarakan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada tahun anggaran 2015. Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan syarat untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia (Nugraheni, dkk, 2008). Akuntansi berbasis akrual berarti akuntansi diakui saat terjadinya peristiwa ekonomi. Dengan menerapkan akuntansi berbasis akrual, laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan akan lebih berkualitas karena informasi yang dihasilkan lebih komprehensif dan lebih baik bagi penggunaannya (Permana, 2016). Menurut Nordiawan (2006), SAP yang diberlakukan di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Adhi dan Suhardjo, (2013) tentang pengaruh SAP dan kualitas aparatur pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan menunjukkan bahwa SAP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. SAP sebaiknya digunakan sebagai acuan untuk menyusun laporan keuangan yang baik dan benar. Laporan keuangan yang telah selesai dibuat oleh pemerintah akan diaudit oleh BPK, dan hasil audit tersebut dapat dipublikasikan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar (Prasetya, 2005). Laporan keuangan yang dipublikasikan buruk, berarti dalam laporan keuangan tersebut terdapat kesalahan penyajian yang material, tidak disusun berdasarkan standar pelaporan (Mahmudi, 2010). Dari uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis:

H1: SAP berbasis akrual berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.

2. Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Dinas Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.

Sistem Informasi Akuntansi Dinas Daerah dapat mempermudah pemerintah dalam menyusun laporan keuangan. Sistem Informasi Akuntansi memiliki kontribusi terhadap kualitas laporan keuangan terutama dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang dihasilkan (Romney dan Steinbart, 2009). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tutun (2013) yang berjudul pengaruh penerapan sistem akuntansi dan standar akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Gorontalo menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik akan berdampak terhadap kualitas laporan keuangan yang baik. Sistem informasi akuntansi dapat meminimalisir kesalahan penyajian data akuntansi serta menghasilkan laporan yang dapat mengurangi kecurangan (Sujadijaya, 2017). Penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan memadai, tentu mampu menghasilkan informasi yang berkualitas. Dari uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis:

H2: SIADINDA berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.

3. Pengaruh *Good Public Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman

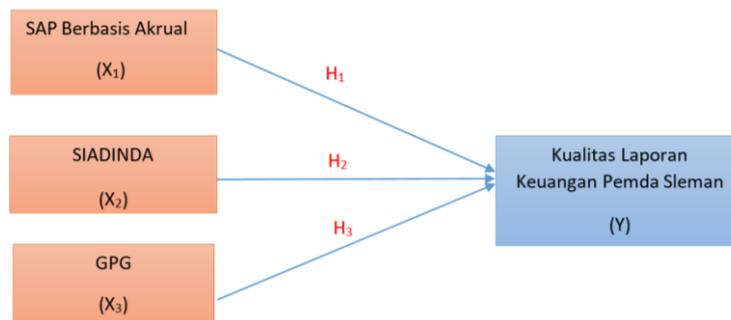
Berkembangnya akuntansi sektor publik mendorong perubahan peran pemerintah. Pemerintah dituntut untuk memiliki pemerintahan yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Pemerintah diharapkan dapat mengelola daerahnya dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki untuk kemakmuran masyarakat (Yusuf, 2009). *Good Governance* menjadi pedoman organisasi dalam bertindak untuk mensejahterakan masyarakat.

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas wewenang yang diberikan oleh rakyat. Laporan keuangan tersebut harus disajikan secara transparan sehingga akuntabilitasnya dapat tercermin. Akuntabilitas dapat dinilai melalui laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK (Handayani, 2012). Dalam menyelenggarakan pemerintahan tidak dapat terlepas dari peran *good governance* yang terus mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan. Prinsip *good governance* menjadi acuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Azlim dan Bakar, 2012).

Dengan menerapkan GPG diharapkan laporan keuangan yang dihasilkan dapat terbebas dari salah saji. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Sari dan Tamrin) tentang pengaruh penerapan *Good Government Governance* (GGG) dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan, diperoleh hasil bahwa penerapan GGG berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Dari uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis:

H₃ : *Good Public Governance* berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.

Kerangka Penelitian



Gambar 1 Kerangka Penelitian

METODE PENELITIAN

Objek dan Subjek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua, Sistem Informasi Akuntansi Dinas Daerah, *Good Public Governance*, dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Subjek dalam penelitian ini yaitu ASN setiap SKPD pada OPD Kabupaten Sleman yang terdiri dari Kepala Bidang Akuntansi, Kepala Bagian Keuangan, Kepala Subbagian Keuangan, Kepala Subbagian Keuangan Perencanaan dan Evaluasi, Bendahara Subbagian Keuangan, Bendahara Subbagian Keuangan Perencanaan dan Evaluasi, Analis dan Pembuku Subbagian Keuangan, Analis Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan Subbagian Keuangan Perencanaan dan Evaluasi, Pengadministrasi Keuangan Subbagian Keuangan, Pengadministrasi Keuangan Subbagian Keuangan Perencanaan dan Evaluasi, Pengadministrasi Perencanaan dan Program Subbagian Keuangan Perencanaan dan Evaluasi, Pengelola Keuangan Subbagian Keuangan, Pengelola Keuangan Subbagian Keuangan Perencanaan dan Evaluasi, dan Pengelola Bahan Perencanaan Subbagian Keuangan Perencanaan dan Evaluasi SKPD Kabupaten Sleman.

Metode dan Desain Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Menurut Sugiyono (2009: 13) metode kuantitatif merupakan metode penelitian berlandaskan filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Menurut Hartono (2004: 140) survei merupakan suatu metode pengumpulan data primer untuk mendapatkan data opini individu. Survei penelitian dilakukan dengan menggunakan angket sebagai alat pengambilan data.

Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik total *sampling*. Menurut Sugiyono (2009: 124) total sampling merupakan teknik pengambilan sampel dimana semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh ASN setiap SKPD pada OPD Kabupaten Sleman

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik survei. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari responden dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup yang diadopsi dan dimodifikasi dari penelitian sebelumnya.

Penelitian ini menggunakan skala *Likert* untuk mengukur pendapat seseorang tentang fenomena sosial. Pengukuran dengan skala *Likert* pada penelitian ini dibagi menjadi empat kategori dengan skor antara 1 sampai dengan 4, yaitu sangat tidak setuju (STS), tidak setuju (TS), setuju (S), dan sangat setuju (SS). Dengan menggunakan empat kategori skala *Likert*, diharapkan mampu menghasilkan jawaban yang akurat, tidak memiliki arti ganda atau netral.

Variabel Penelitian

Variabel Terikat

Variabel terikat atau variabel dependen adalah suatu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas (Sugiyono, 2009: 59). Pada penelitian ini, variabel terikatnya adalah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, kualitas laporan keuangan dapat diukur dengan indikator karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu: relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan.

Variabel Bebas

Variabel bebas atau variabel independen adalah suatu variabel yang memengaruhi atau menyebabkan terjadinya perubahan atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2009: 59). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrua, Sistem Informasi Akuntansi Dinas Daerah (SIADINDA), dan *Good Public Governance* (GPG). SAP merupakan pedoman yang digunakan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Penerapan SAP diukur dengan 13 indikator PSAP. Sistem Informasi Akuntansi Dinas Daerah merupakan aplikasi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman untuk mengelola keuangan pemerintah. *Good Public Governance* merupakan pedoman yang mengatur hubungan pemerintah dengan rakyat atau pemerintah dengan pemerintah. Indikator dalam variabel GPG disesuaikan dengan Pedoman KNKG (2008) Tentang Pedoman *Good Public Governance*.

Teknik Analisis Data

Uji Asumsi Klasik

Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan jika model penelitian ini telah memenuhi syarat lolos uji asumsi klasik. Syarat yang harus dipenuhi adalah data harus terdistribusi secara normal, tidak mengandung multikolinearitas, dan heteroskedastisitas.

Uji Normalitas

Tujuan dilakukannya uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah antara variabel independen dan variabel dependen terdistribusi secara normal atau tidak (Rahmah dan Zulkifli, 2018). Uji normalitas dilakukan dengan analisis statistik menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Jika nilai Signifikansi $> 0,05$ maka data terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk membuktikan apakah ditemukan korelasi antara variabel bebas dan model regresi. Jika *tolerance* $\leq 0,1$ dan *VIF* ≥ 10 maka terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2013).

Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dilakukannya pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual untuk suatu pengamatan terhadap pengamatan lain (Rahmah dan Zulkifli, 2018). Apabila nilai *t* statistik dari semua variabel masing masing memiliki tingkat signifikansi $> 0,05$, dapat disimpulkan bahwa pengujian variabel tersebut tidak mengalami masalah heteroskedastisitas dan data bersifat homoskedastisitas.

Pengujian Hipotesis Penelitian

Pengujian hipotesis penelitian dilakukan untuk memperoleh kebenaran atas prediksi dan pengujian regresi yang dilakukan, dengan mencari nilai: Koefisien Determinan (R^2). Digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013). Uji koefisien determinasi digunakan untuk menjelaskan seberapa besar kemampuan model atau interaksi antara SAP, SIADINDA, dan GPG dalam menjelaskan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.

Uji Statistik F

Uji statistik F digunakan untuk melakukan pengujian apakah semua variabel independen berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013). Apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka terdapat pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen

Uji Statistik t

Digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel terikat dalam menerangkan variasi variabel bebas (Ghozali, 2013). Menggunakan nilai signifikansi 5% dan tingkat keyakinan 95%, kriteria pengujiannya apabila hitung $> t$ tabel dan nilai signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis Regresi Linier Berganda digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah nilai residual terdistribusi secara normal atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Data dikatakan terdistribusi secara normal apabila nilai $\text{asympt. sig}(2\text{-tailed}) > 0,05$.

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas

	Unstandardized Residual
N	139
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,100 ^c

Sumber: data diolah, 2020.

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa hasil pengujian dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS 22.0 diperoleh nilai *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,100. Hal ini menunjukkan bahwa hasil $\text{asympt. sig}(2\text{-tailed}) 0,100 > 0,05$. Sehingga, dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa nilai residual terdistribusi secara normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah ada korelasi antara variabel bebas.. Model regresi yang baik tidak akan ditemukan korelasi antara variabel bebas. Suatu data dikatakan tidak memiliki gejala multikolinearitas apabila nilai *tolerance* $> 0,1$ dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10 .

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Penelitian	Tolerance	VIF
Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua	0,627	1,594
Sistem Informasi Akuntansi Dinas Daerah	0,502	1,991
Good Public Governance	0,641	1,561

Sumber: data diolah, 2020

Tabel di atas menunjukkan nilai *tolerance* untuk variabel Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua sebesar 0,627, lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF sebesar 1,594, kurang dari 10. Nilai *tolerance* untuk variabel Sistem Informasi Akuntansi Dinas Daerah sebesar 0,502, lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF sebesar 1,991, kurang dari 10. Nilai *tolerance* untuk variabel Good Public Governance sebesar 0,641, lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF sebesar 1,561, kurang dari 10. Dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini seluruh variabel memiliki nilai *tolerance* $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 , sehingga data penelitian ini tidak memiliki gejala multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual untuk semua pengamatan dari model regresi (Rahmah dan Zulkifli, 2018). Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Uji *Glejser*. Data dikatakan tidak mengalami masalah heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual $> 0,05$.

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel Penelitian	Nilai Signifikansi
Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua	0,095
Sistem Informasi Akuntansi Dinas Daerah	0,083
Good Public Governance	0,849

Sumber: data diolah, 2020

Berdasarkan tabel di atas, nilai signifikansi antara variabel Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dengan absolut residual sebesar 0,095, lebih besar dari 0,05. Nilai signifikansi antara variabel Sistem Informasi Akuntansi Dinas Daerah dengan absolut residual sebesar 0,083, lebih besar dari 0,05. Nilai signifikansi antara variabel *Good Public Governance* dengan absolut residual sebesar 0,849, lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi seluruh variabel independen dengan absolut residual lebih besar dari 0,05. Data pada penelitian ini tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

d. Pengujian Linearitas

Hasil analisis regresi linier berganda adalah sebagai berikut.

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		T	Sig	Keterangan
	B	Std. Error			
(Constant)	6,758	2,204	3,060	0,03	
SAP Berbasis Akrual	0,119	0,024	4,931	0,00	Diterima
SIADINDA	0,170	0,038	4,494	0,00	Diterima
GPG	0,395	0,132	2,985	0,03	Diterima

Sumber: data diolah, 2020

Berdasarkan tabel di atas persamaan regresi linier berganda menunjukkan nilai konstanta sebesar 6,758, artinya variabel penerapan SAP Berbasis Akrual, SIADINDA, dan GPG dianggap konstan, maka besarnya Kualitas Laporan Keuangan sebesar 6,758. Sehingga, berdasarkan analisis regresi linier berganda diperoleh persamaan berikut.

$$Y = 6,758 + 0,119 (X_1) + 0,170 (X_2) + 0,395 (X_3) + 2,204$$

e. Pengujian Hipotesis Penelitian

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk menguji seberapa besar kemampuan interaksi antara variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen.

Tabel 5. Hasil Koefisien Determinan

Model	R	R^2	Adjusted R^2
1	0,763 ^a	0,583	0,574

Sumber: data diolah, 2020

Berdasarkan hasil pengujian di atas, diketahui bahwa koefisien determinasi 0,574, artinya 57,4% Kualitas Laporan Keuangan dipengaruhi oleh variabel Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, Sistem Informasi Akuntansi Dinas Daerah, dan *Good Public Governance*. Sedangkan 42,6% dijelaskan oleh variabel lainnya.

Uji Statistik F

Pengujian ini dilakukan untuk memastikan apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Apabila nilai signifikansi < 0,05 maka terdapat pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Jika $F_{tabel} < F_{hitung}$, maka hipotesis diterima, variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika $F_{tabel} > F_{hitung}$, maka hipotesis ditolak, variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Menggunakan nilai signifikansi 5%, $F_{tabel} = (k ; n-k) = (3 ; 139-3) = (3 ; 136) = 2,67$.

Tabel 6. Hasil Uji F

Variabel Independen	F Tabel	F Hitung	Nilai Signifikansi
Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual	2,67	62,865	0,000 ^b

Variabel Independen	F Tabel	F Hitung	Nilai Signifikansi
Sistem Informasi Akuntansi Dinas Daerah			
<i>Good Public Governance</i>			

Sumber: data diolah, 2020

Diketahui bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai F hitung sebesar 62,865 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. F tabel < F hitung dan nilai signifikansinya < 0,05. Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen, yaitu Kualitas Laporan Keuangan. Uji Statistik t

Uji statistik t digunakan untuk menguji pengaruh variabel terikat dalam menerangkan variasi variabel bebas (Ghozali, 2013: 98). Kriteria pengujiannya t hitung > t tabel dan nilai signifikansinya < 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Menggunakan nilai signifikansi 5% dan tingkat keyakinan 95%, uji t dalam penelitian ini dilakukan dengan derajat kebebasan $(n-k-1) = 135$, maka diperoleh t tabel = 1,65622.

Tabel 7. Hasil Uji t

Variabel Penelitian	Unstandardized Coeficients B	t hitung	t Tabel	NilaiSig
Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua	0,119	4,931	1,65622	0,000
Sistem Informasi Akuntansi Dinas Daerah	0,170	4,494	1,65622	0,000
<i>Good Public Governance</i>	0,395	2,985	1,65622	0,003

Sumber: data diolah, 2020

Diketahui bahwa nilai signifikansi variabel Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua sebesar 0,000. Nilai signifikansi variabel Sistem Informasi Akuntansi Dinas Daerah sebesar 0,000. Nilai signifikansi variabel *Good Public Governance* sebesar 0,003. Berdasarkan Tabel 5.18 di atas, dapat dilihat bahwa ketiga variabel independen tersebut berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu kualitas laporan keuangan. t hitung > t tabel dan nilai signifikansi < 0,05, sehingga H_a diterima.

Hasil Penelitian dan Interpretasi

Berdasarkan hasil pengujian statistik atas hipotesis yang diajukan, maka dapat dibuat pembahasan sebagai berikut.

1. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrua berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman

Jika dilihat pada Tabel 7, diperoleh hasil perhitungan t hitung > t tabel ($4,931 > 1,65622$) dan nilai signifikansi < 0,05, sehingga hipotesis pertama diterima. SAP Berbasis Akrua yang diterapkan berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 yang dinyatakan dalam 13 bentuk PSAP, dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun berdasarkan Kerangka Konseptual Akuntansi tersebut terbukti berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Menggunakan SAP Berbasis Akrua berarti seluruh transaksi ekonomi yang dilakukan setiap SKPD pada OPD Kabupaten Sleman diakui, dicatat, dan dilaporkan pada periode laporan keuangan saat terjadinya transaksi. Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, suatu laporan keuangan dikatakan berkualitas jika memenuhi karakteristik kualitatif relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

SAP Berbasis Akrua membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman untuk mempertanggungjawabkan aktivitas organisasinya melalui penyusunan laporan keuangan yang lebih berkualitas. Selain itu penelitian ini juga mendukung teori sinyal. Pemerintah

memberikan sinyal kepada masyarakat dengan menyampaikan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan yang dibuat pemerintah menggunakan SAP Berbasis Akruwal akan diaudit oleh BPK, kemudian BPK akan memberi opini atas laporan keuangan tersebut. Kualitas laporan keuangan dapat dilihat dari raihan opini BPK atas laporan keuangan yang dihasilkan. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini mendukung penelitian Herawati dan Nopianti (2017), Angelicca (2019), dan Pujanira (2017) yang mengatakan bahwa SAP berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Namun berbedadengan penelitian sebelumnya, pada penelitian Rahmah dan Zulkifli (2018) diperoleh hasil bahwa SAP Berbasis Akruwal tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

2. Sistem Informasi Akuntansi Dinas Daerah (SIADINDA) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman

Berdasarkan hasil pengujian di atas, diperoleh hasil perhitungan t hitung $>$ t tabel (4,494 $>$ 1,65622) dan nilai signifikansi $<$ 0,05, sehingga hipotesis kedua diterima. Berdasarkan analisis data, SIADINDA berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Sistem akuntansi diperlukan untuk mengumpulkan, mencatat, hingga melaporkan pertanggungjawaban keuangan yang dapat dilakukan secara manual ataupun menggunakan komputer. Sistem akuntansi yang digunakan oleh pemerintah harus mengacu pada SAP yang ditetapkan.

Laporan keuangan merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintah atas penyelenggaraan anggaran belanja. Sistem akuntansi penting untuk menyusun laporan keuangan yang relevan, andal, dan dapat dipercaya (Mardiasmo, 2004). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan SIADINDA mampu memberikan dukungan terhadap kualitas laporan keuangan, dibuktikan dengan diterimanya hipotesis dalam penelitian ini. Menurut teori sinyal, pemerintah telah mendapatkan wewenang dari rakyat ingin menunjukkan sinyal kepada rakyat dengan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Menurut teori keagenan, rakyat telah memberikan wewenang kepada pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dapat menghasilkan keputusan. Oleh karena itu, pemerintah wajib mempertanggungjawabkan wewenang rakyat melalui laporan keuangan.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian Pujanira (2017) yang mengatakan bahwa penerapan Sistem Akuntansi Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan daerah. Namun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini berbedadengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian Rahmah dan Zulkifli (2018) yang mengatakan bahwa SAKD tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Penelitian Maramis, dkk (2018) mengatakan bahwa SAK tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

3. *Good Public Governance* berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman

Berdasarkan hasil pengujian di atas, diperoleh hasil perhitungan t hitung $>$ t tabel (2,985 $>$ 1,65622) dan nilai signifikansi $<$ 0,05, sehingga hipotesis ketiga diterima. *Good Public Governance* berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. *Good Public Governance* dalam penelitian ini diterapkan berdasarkan asas GPG dalam KNKG (2008), yaitu asas demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum, dan kewajaran dan kesetaraan. Asas akuntabilitas *Good Public Governance* salah satunya mengatur bagaimana pemerintah mempertanggungjawabkan kegiatannya secara jujur dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini mendukung teori keagenan.

GPG dalam teori keagenan menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman wajib menyelenggarakan tata kelola organisasi yang baik dalam menyusun laporan keuangan, yang merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat. Penerapan

GPG terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan diterimanya hipotesis ketiga ini. Diterapkannya GPG dalam penyusunan laporan keuangan tentu akan membuat informasi dalam laporan keuangan tersebut lebih memadai dan dapat dengan mudah diakses atau digunakan oleh para pemangku kepentingan. Hal ini sejalan dengan teori sinyal. Teori sinyal ingin menjelaskan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman yang dilandasi tata kelola organisasi yang baik akan lebih relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Hasil penelitian dalam penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya, yaitu penelitian Maramis, dkk (2018) yang mengatakan *Good Governance* berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Namun penelitian ini berbeda dengan penelitian Herawati dan Nopianti (2017) yang menemukan bahwa *Good Governance* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Laporan keuangan yang berkualitas dapat dihasilkan dengan menggunakan SAP Berbasis Akrual berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam menyusun laporan keuangan.
2. Sistem Informasi Akuntansi Dinas Daerah (SIADINDA) berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Penyusunan laporan keuangan menggunakan Sistem Informasi Akuntansi Dinas Daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintah yang berlaku, dapat meningkatkan kualitas laporan yang dihasilkan.
3. *Good Public Governance* (GPG) berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Penerapan *Good Public Governance* berdasarkan asas demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum, dan kewajaran dan kesetaraan, dapat mendorong terciptanya laporan keuangan yang semakin berkualitas.

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian di atas maka peneliti memberikan saran sebagai berikut.

1. Bagi Instansi
Setiap SKPD pada OPD Kabupaten Sleman selalu menerapkan standar akuntansi pemerintah yang berlaku umum dengan menggunakan sistem informasi akuntansi yang dimiliki, yang sudah disesuaikan dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku, dan tetap memperhatikan tata kelola pemerintahan yang baik, karena hal tersebut dapat mendorong terciptanya laporan keuangan yang berkualitas.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
 - a. Peneliti selanjutnya dapat memberikan perlakuan untuk mengontrol OPD yang sudah dan yang belum menerapkan akuntansi berbasis akrual berdasarkan 13 bentuk PSAP menurut PP No 71 Tahun 2010.
 - b. Peneliti selanjutnya dapat mengirimkan pesan pengingat kepada responden beberapa hari setelah kuesioner dikirimkan.
 - c. Peneliti selanjutnya dapat memperluas tempat penelitian di tingkat propinsi.
 - d. Peneliti selanjutnya dapat menguji pengaruh faktor lain yang dapat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi, Daniel Kartika dan Y. Suhardjo. 2013. "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Tual)". *Jurnal Akuntansi STIE Semarang*. Vol. 5. No. 3
- Afiah, Nunuy Nur. 2009. *Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Angelicca, Maya. 2019. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi di Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah). *Skripsi*. Universitas Sanata Dharma.
- Artana, Arlia Sari. 2016. Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri SyarifHidayatullah Jakarta.
- Azlim, Darwanis., U.A. Bakar. 2012. "Pengaruh Penerapan Good Government Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan". *Jurnal Akuntansi*.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Erlangga.
- Brodjonegoro, Bambang Permadi Soemantri. 2014. Selain WTP, Pelayanan ke Masyarakat dan Good Governance Juga Harus Baik. www.kemenkeu.go.id Diakses tanggal 6 November 2019.
- Defitri, Siska Yulia. 2018. "Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah". *Jurnal Benefita*. Vol. 3. No. 1: 64-75.
- Drama, H. 2014. "Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada SKPD Kota Solok)". *Jurnal Akuntansi*. Vol. 2. No. 3.
- Effendi, Taufiq. 2009. *Pengertian Good Public Governance*.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi Ketujuh. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Halim, Abdul., Y.E. Restianto., dan I.W. Karman. 2010. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Hall, James A. 2007. "System Information Accounting". Jakarta: Salemba Empat.
- Handayani, Desi. 2020. "Good Governance dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah". *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*. Vol.5: 12-26.
- Hartono, Jogiyanto. 2004. *Metode Penelitian Bisnis Salah Kaprah dan Pengalaman Pengalaman*. Yogyakarta: BPFE Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM.
- Herawati, Tuti dan D. Nopianti. 2017. "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Pemerintah Daerah". *Star-Studi and Accounting Research*. Vol. XIV. No. 2: 10-45.
- Juwita, Rukmi. "Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan". *Jurnal Trikonomika*. Vol. 12.No. 2: 201-214.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). 2008. *Pedoman Umum Good Public Governance Indonesia*. Jakarta.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik, Edisi Kedua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, Moh., F. Sulistiyowati., dan H.A. Purwanugraha. 2013. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Ketiga*. Yogyakarta: BPFE.

- Maramis, Miranda Miryam., J. Morasa., dan H.R.N Wokas. 2018. "Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Manado". *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. Vol. 13. No. 3: 563-570.
- Maryana, Hana., E. Sukarmanto., dan Nurhayati. 2018. "Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Badan Usaha Milik Negara di Kota Bandung)". *Prosiding Akuntansi*. Vol. 4. No. 2: 701-707.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Murfa Surya Mahardika. "SIADINDA". <http://www.msimgroup.co.id/produk348-SIADINDA.html> Diakses tanggal 6 November 2019.
- Nordiawan, Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nordiawan, Deddi. 2008. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nordiawan, Deddi., I.S. Putra., dan M. Rahmawati. 2008. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nugraheni, Purwaniati dan I. Subaweh. 2008. "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan". *Jurnal Ekonomi Bisnis*. Vol. 13. No. 1: 48-58.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Permana, Arieffin Dian. 2016. "Penerapan Aplikasi Saiba untuk Penyusunan Laporan Keuangan". *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*. Vol. 14 No 1: 65-77.
- Prasetya, Gede Edi. 2005. *Penyusunan dan Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Pujanira, Putriasri. 2017. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Rahmah, Kurnia dan Zulkifli. 2018. "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul (Studi Empiris pada Instansi Pemerintahan Kabupaten Gunung Kidul DIY)". *Jurnal Kajian Bisnis*. Vol. 26. No. 2: 113-130.
- Raihan Opini WTP. "Sleman Meraih opini WTP dari BPK untuk yang ke-8 kalinya". <https://dprd.slemankab.go.id/2019/04/sleman-meraih-opini-wtp-dari-bpk-untuk-yang-ke-8-kalinya/> Diakses tanggal 5 Desember 2019
- Ratifah, I dan M. Ridwan. 2012. "Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan". *Trikonomika*. Vol. 11. No. 1: 29-39.
- Romney dan Steinbart. 2009. *Accounting Information System*. New Jersey: Pearson Education.
- Ronanda, Fransisca Harpranisa Cahyani. 2019. Pengaruh Penerapan *Good Government Governance* Terhadap Kualitas Anggaran (Studi di Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta). *Skripsi*. Universitas Sanata Dharma.
- Roviyantie, Devi. 2011. "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah". *Jurnal Akuntansi Universitas Siliwangi*. Vol. 2: 1-27.

- Sari, Ika Maya dan A. Tamrin. "Pengaruh Penerapan Good Government Governance dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Studi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari)". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo*. 106-121.
- Sari, Ni Putu Yogi Merta Maeka, I.M. Pradana, dan E. Sujana. 2014. "Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Dinas-Dinas di Pemerintah Kabupaten Jembrana)". *e-Journal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol. 2. No. 1.
- Spathis Ch., M. Doumpos dan C. Sopounidis. 2002. "Detecting Falsified Financial Statement: A Comparative Study Using Multicriteria Analysis and Multivariate Statistical Techniques". *The European Accounting Review*. Vol. 11. No. 3: 509-535.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujadijaya, Trimono. 2017. Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Skripsi*. Universitas Pasundan.
- Tutun, Hermawanto Botutihe. 2013. "Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Kota Gorontalo". *Jurnal Ekonomi Akuntansi Universitas Negeri Gorontalo*.
- Yusuf, Deddy Somantri. 2009. *Pengaruh Good Governance Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Bandung*

